



**PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN PORNOGRAFI
DI MEDIA SOSIAL**

TESIS

**Disusun Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Magister Ilmu Hukum (M.H.)**

**NADYA ALFANI
P2B122084**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS JAMBI
PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
JAMBI
2025**



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JAMBI
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM**

PERSETUJUAN TESIS

Tesis ini diajukan oleh :
Nama : **NADYA ALFANI**
Nomor Mahasiswa : **P2B122084**
Program Kekhususan : **Hukum Pidana**
Judul : **Perlindungan Hukum Korban Pornografi
di Media Sosial.**

Telah disetujui oleh Pembimbing pada tanggal seperti tertera di bawah ini
untuk dipertahankan di hadapan Tim Penguji Tesis
Pada Program Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Jambi

Jambi, 26 Februari 2025

Pembimbing Utama

Pembimbing Pembantu

Prof. Dr. Hafrida, S.H., M.H.
NIP. 196505181990012001

Dr. H. Herry Liyus, S.H., M.H.
NIP.196812261993031003



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JAMBI
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM**

PENGESAHAN TESIS

Tesis ini diajukan oleh :
Nama : **NADYA ALFANI**
Nomor Mahasiswa : **P2B122084**
Program Kekhususan : **Hukum Pidana**
Judul : **Perlindungan Hukum Korban Pornografi
di Media Sosial.**

Tesis ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Tesis
Pada Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Jambi pada tanggal 26 Februari 2025
dan dinyatakan **LULUS**

TIM PENGUJI

NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
Dr. H. Taufik Yahya, S.H., M.H.	Ketua Penguji	_____
Dr. Erwin, S.H., M.H.	Sekretaris	_____
Dr. Elly Sudarti, S.H., M.Hum.	Penguji Utama	_____
Prof. Dr. Hafrida, S.H., M.H.	Anggota	_____
Dr. H. Herry Liyus, S.H., M.H.	Anggota	_____

Menyetujui:
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Jambi

Mengesahkan:
Ketua Program Magister Ilmu Hukum
Universitas Jambi

Dr. H. Usman, S.H., M.H.
NIP. 19640503 199003 1 004

Dr. H. Taufik Yahya, S.H., M.H.
NIP. 19650107 199003 1 002

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penyusun panjatkan pada Allah S.W.T atas segala kuasa, berkat dan Rahmat-nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan penulisan Tesis ini yang berjudul “**Perlindungan Hukum Korban Pornografi di Media Sosial**”. Penulisan Tesis ini untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum (M.H) pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jambi.

Selama mengikuti pendidikan di Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jambi, penulis telah banyak memperoleh ilmu pengetahuan khususnya Ilmu Hukum Kepidanaan. Penulis juga akan terus belajar untuk menambah wawasan.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu sehingga tesis ini bisa diselesaikan terutama kepada **Prof. Dr. Hafrida, S.H., M.H.**, dan **Dr. H. Herry Liyus, S.H., M.H.**, Pembimbing Utama dan Pembimbing Pembantu yang telah banyak membimbing dan mengarahkan penulis. Penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Helmi, S.H., M.H., Rektor Universitas Jambi, yang telah memfasilitasi sarana prasarana dan para dosen yang berpengalaman, sehingga memudahkan penulis mengikuti perkuliahan pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jambi.
2. Prof. Dr. H. Usman, S.H., M.H., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jambi yang memberi kemudahan dalam fasilitas perkuliahan sehingga penulis merasa nyaman selama mengikuti perkuliahan.

3. Dr. H. Taufik Yahya, S.H., M.H., Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jambi yang secara tulus dan ikhlas memberikan bimbingan dan arahan dalam Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jambi ini.
4. Hj. Andi Najemi, S.H., M.H., Sekretaris Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jambi yang secara tulus dan ikhlas memberikan bimbingan dan arahan dalam Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jambi ini.
5. Para Dosen Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jambi yang dengan tulus dan ikhlas memberikan petunjuk dan bimbingan selama mengikuti perkuliahan.
6. Staf Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jambi yang dengan tulus dan ikhlas membantu administrasi selama mengikuti perkuliahan.
7. Rekan-rekan penulis yang telah banyak membantu penulis, baik itu dari segi moril maupun materil hingga terselesaikannya tesis ini.
8. Ayahanda beserta Ibunda yang telah memberikan dukungannya, kasih sayang, nasehat dan do'a kepada penulis.

Selanjutnya kepada semua pihak yang telah membantu baik moril maupun materil, semoga segala bantuan tersebut menjadi amal baik, semoga Allah S.W.T membalasnya berlipat ganda.

Penulis menyadari bahwa penyusunan Tesis ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis

harapkan dalam rangka perbaikan dan penyempurnaan, sehingga Tesis ini dapat bermanfaat bagi yang membutuhkan.

Jambi, 26 Februari 2025

Penulis

Nadya Alfani
P2B12208453

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bentuk perlindungan hukum korban pornografi di Media sosial dan upaya untuk mendapatkan perlindungan hukum korban pornografi di media sosial. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan kasus. Hasil penelitian bahwa: Bentuk perlindungan terhadap korban kejahatan dapat didasarkan pada dampak atau kerugian yang dirasakan oleh korban pornografi di media sosial. Pada umumnya, perlindungan tersebut antara lain: a) Restitusi, yaitu Restitusi merupakan bentuk ganti kerugian yang diberikan oleh pelaku kepada korban, keluarganya atau pihak ketiga; b) Bantuan Medis dan Bantuan Rehabilitasi Psiko-Sosial, yaitu Korban berhak mendapatkan bantuan baik secara medis maupun bantuan rehabilitasi psiko-sosial. Bantuan yang dimaksud dapat diberikan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban; c) Perlindungan dari Keluarga, yaitu Keluarga dapat memberikan dorongan dan motivasi agar korban tidak larut dalam kesedihan maupun masalah yang dihadapinya; d) Perlindungan dari Masyarakat, yaitu Masyarakat harus mampu mengayomi dan melindungi korban dengan tidak memberikan stigma, mengucilkan korban, dan tidak menjauhi korban. Upaya perlindungan hukum korban pornografi di media sosial. Dalam kasus tindak pidana pornografi dalam media elektronik, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, dimana pasal yang memiliki muatan atau hubungan terkait pelanggaran pornografi yaitu berkaitan dengan Pasal 27 ayat (1) jo Pasal 45 ayat (1) UU ITE. Pada Pasal 27 ayat (1) UU ITE mengatur tentang perbuatan yang dilarang; setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum. Penegakan terhadap perlindungan hukum korban kejahatan pornografi juga diatur dalam Pasal 4 s/d Pasal 14 UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Yaitu siapa pun dilarang membuat, mengedarkan, dan memfasilitasi kekerasan seksual, hubungan intim, masturbasi atau onani, tampilan yang tidak berbusana, pertunjukan alat vital atau porno aksi anak.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Korban Pornografi, Media Sosial

LEGAL PROTECTION FOR VICTIMS OF PORNOGRAPHY ON SOCIAL MEDIA

ABSTRACT

The purpose of this study is to determine and analyze the form of legal protection for victims of pornography on social media and efforts to obtain legal protection for victims of pornography on social media. This study is a normative legal study. Legislative approach, conceptual approach, case approach. The results of the study are: The form of protection for victims of crime can be based on the impact or loss felt by victims of pornography on social media. In general, this protection includes: a) Restitution, namely Restitution is a form of compensation given by the perpetrator to the victim, his family or a third party; b) Medical Assistance and Psycho-Social Rehabilitation Assistance, namely Victims have the right to receive assistance both medically and psycho-social rehabilitation assistance. The assistance in question can be provided by the Witness and Victim Protection Agency; c) Protection from the Family, namely the Family can provide encouragement and motivation so that victims do not get lost in sadness or the problems they face; d) Protection from the Community, namely the Community must be able to protect and protect victims by not stigmatizing, ostracizing victims, and not distancing themselves from victims. Efforts to protect the law for victims of pornography on social media. In cases of criminal acts of pornography in electronic media, as regulated in Law No. 1 of 2024 concerning Amendments to Law No. 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions, where the article that has content or relationship related to pornography violations is related to Article 27 paragraph (1) in conjunction with Article 45 paragraph (1) of the ITE Law. Article 27 paragraph (1) of the ITE Law regulates prohibited acts; without the right to distribute and/or transmit and/or make accessible electronic information and/or electronic documents that have content that violates morality. Enforcement of legal protection for victims of pornography crimes is also regulated in Articles 4 to 14 of Law No. 44 of 2008 concerning Pornography. Namely, anyone is prohibited from making, distributing, and facilitating sexual violence, intimate relationships, masturbation or onanism, unclothed displays, shows of vital organs or child action pornography.

Keywords: Legal Protection, Pornography Victims, Social Media